

1. SURAT PENGANTAR UPT KE KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY BANDUNG
Jl. Soekarno Hatta No. 187 A Bandung
Telepon / Faksimile (022) 5202751, Email : lapasbanceuy@gmail.com

Nomor : W.11.PAS.PAS.3-PL.01.01-1226
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian usulan pembangunan Lapas
Kelas IIA Banceuy TA. 2021

12 Oktober 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat

di-

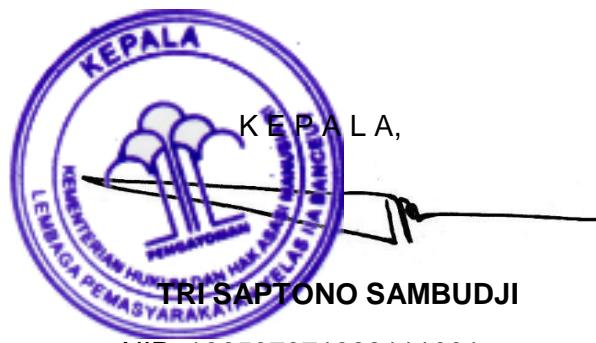
Bandung

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan usulan pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Satuan		Harga	Jumlah
1	Pembangunan blok hunian	792	M2	11.790.000	9.273.528.000
2	Pembangunan dapur	250	M2	7.711.000	1.927.750.000
3	Pembangunan pagar pembatas area	69	M	17.000.000	1.173.000.000
4	Konsultan perencana	1	Ls	651.979.000	651.979.000
5	Manajemen konstruksi	1	Ls	481.120.000	481.120.000
6	Pengelolaan kegiatan	1	PKT	350.000.000	350.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN					13.857.377.000

Demikian disampaikan, besar harapan kami usulan tersebut dapat terpenuhi. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak diucapkan terimakasih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



**2. SURAT
PENGANTAR
KANWIL KE
DITJENPAS**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27 Bandung 40272,

Telepon : (022) 7272185, 7273898 Faksimili : (022) 7206839

Laman: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: sumaker.kumhamjabar@gmail.com

Nomor : W.11-PR.02.04 – 7860

16 Oktober 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

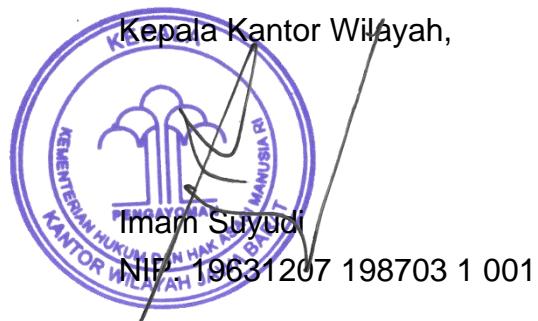
Hal : Penyampaian usulan pembangunan Lapas Kelas IIA Banceuy
TA. 2021

Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy nomor: W.11.PAS.PAS.3-PL.01.01-1226 tanggal 12 Oktober 2020 tentang penyampaian usulan pembangunan Lapas Kelas IIA Banceuy Ta. 2021, bersama ini kami sampaikan usulan pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Satuan		Harga	Jumlah
1	Pembangunan blok hunian	792	M2	11.790.000	9.273.528.000
2	Pembangunan dapur	250	M2	7.711.000	1.927.750.000
3	Pembangunan pagar pembatas area	69	M	17.000.000	1.173.000.000
4	Konsultan perencana	1	Ls	651.979.000	651.979.000
5	Manajemen konstruksi	1	Ls	481.120.000	481.120.000
6	Pengelolaan kegiatan	1	PKT	350.000.000	350.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN					13.857.377.000

Demikian disampaikan, besar harapan kami usulan tersebut dapat terpenuhi. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

3. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R I
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA**

Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta Telepon : 0274 374307 Fax : 0274 376324
Laman : <http://bapasyogya.info/sibango/>, email : bapas.yogyakarta@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Nomor : W14.PAS.PAS.4.KU.01.05 – 7850

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Syeh Banna

NIP : 196712191992031002

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang disajikan pada Usulan Pembangunan Gedung Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Tahun 2021.
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan data yang dikirimkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia melengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Yogyakarta, 07 September 2020
Kepala,



Muhammad Ali Syeh Banna
NIP. 196712191992031002

4. TOR / KAK

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
RINCIAN OUTPUT
6231.EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT T.A
2021**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
RINCIAN OUTPUT 6231.EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT T.A. 2021

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas
Indikator Kinerja Program		Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan;
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
Indikator kinerja kegiatan (IKK)	:	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Klasifikasi Rincian Output	:	EAE Layanan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Rincian Output	:	6231.EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaga Negara RI Nomor 3194);
- c. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Gambaran Umum

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, UPT Pemasyarakatan menyelenggarakan dukungan fasilitatif yang meliputi kegiatan perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara (BMN) dan kepegawaian.

Setiap UPT Pemasyarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasyarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tercapainya tugas maupun, fungsi pemasyarakatan yang optimal, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam dalam hal ini berkapasitas 80 orang namun isi hunian pada saat ini sebanyak 128 orang yang menjadikan isi Lapas Klas III Pagar Alam over kapasitas. Untuk mengatasi over kapasitas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pagar Alam, sehingga pada Tahun 2007, Pemerintah Kota Pagar Alam mengalokasikan lahan untuk pembangunan Rutan Pagar Alam tanah seluas 19.815M dengan (pinjam pakai).
- Pada Tahun Anggaran 2009 dan 2011 dengan anggaran yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam telah di bangun **tembok keliling,mushollah, dapur, dan ruang kunjungan** pada tanah pinjam pakai tersebut. Pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Sumatera Selatan mengajukan anggaran untuk pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam, **namun belum disetujui.**

- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Pagar Alam untuk dapat dihibahkan tanah yang telah dibangun tembok keliling,dll tersebut diatas dan berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset No. 900/77/DPPKA/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan memberikan dukungan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.bawa terbitnya bukti kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Pagar Alam oleh Badan Pertanahan Nasional kota Pagar Alam Tahun 2016 yang diperuntukkan hibah untuk lokasi pembangunan Rumah Tahanan Kota pagar Alam dengan Sertifikat 04.11.03.05.4.00011.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini kami sampaikan usul pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Pagar Alam dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2021.

B. Penerima Manfaat

1. Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai subjek sekaligus objek pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
2. Petugas Pemasyarakatan sebagai pelaksana Fungsi Pemasyarakatan.
3. Masyarakat yang dalam hal ini adalah keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat umum lain.

C. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Perencanaan Kegiatan

Pemilihan konsultan perencana untuk membuat perencanaan yang diperlukan untuk pembangunan Lanjutan

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan/pelelangan kontraktor pelaksana untuk konsultan pengawas dan Pembangunan Konstruksi

c. Tahap Pasca Kegiatan

Pelaporan dan pertanggung jawaban

6231.EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT

D Rehabilitasi/Renovasi Lapas

Tahapan :

- Pembangunan Gedung Khusus
- Pembangunan Prasara dan Sarana Lingkungan
- Konsultan Perencana
- Konsultan Pengawas
- Biaya Pengelolaan
- Pembangunan Gedung Kantor

1) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kode	Komponen/ Sub Komponen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6231.EAE.951	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT												
051	Gedung dan Bangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D	Rehabilitasi /Renovasi Lapas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

D. Kurun waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Kegiatan pada Rincian Output Program dan Anggaran UPT dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun anggaran 2021

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk mendukung capaian Rincian Output Program dan Anggaran UPT T.A.2021 pada UPT Pemasyarakatan di Wilayah dibutuhkan biaya sebesar Rp. 14.425.383,000- (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*). (RAB Terlampir)

1	Pembangunan Gedung Kantor Teknis	440 M2
2	Pembangunan Blok Hunian	1368 M2
3	Pembangunan Tembok Keliling	24 M'
4	Pembangunan Listrik dan Instalasi	1 Pkt
5	Konsultan Perencana	1 Pkt
6	Manajemen Konstruksi	1 Pkt
7	Pengelola Kegiatan	1 Pkt



RINCIAN ANGGARAN BELANJA
RINCIAN OUTPUT EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT T.A 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Hukum dan HAM RI
UNIT ESELON II/SATKER	: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan / Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam
KEGIATAN	: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan
SASARAN KEGIATAN	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	: EAE Layanan Prasarana Internal
INDIKATOR KRO	: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
RINCIAN OUTPUT	: EAE.951 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT
VOLUME	: 1
SATUAN UKUR	: Unit
ALOKASI DANA	: Rp. 14.425.383.000,-

KODE	URAIAN SUB OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ DETIL	VOLUME SUB OUTPUT	JENIS KOMPONEN UTAMA/PENDUKUNG	RINCIAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
6231.EAE.951	Program dan Anggaran UPT					Rp. 14.425.383.000,-
051	Gedung dan Bangunan					Rp. 14.425.383.000,-
D	Rehabilitasi/ Renovasi					Rp. 14.425.383.000,-
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 14.425.383.000,-
	Pembangunan Gedung Kantor Teknis	440 M2		440 x 7.085.000	7.085.000	3.117.400.000
	Pembangunan Blok Hunian	1368 M2		1368 x 7.000.000	7.000.000	9.576.000.000
	Pembangunan Tembok Keliling	24 M'		24 x 6.500.000	6.500.000	156.000.000
	Pembangunan Listrik dan Instalasi	1 Pkt		1 x 350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Konsultan Perencana	1 Pkt		1 x	510.055.000	510.055.000
	Manajemen Konstruksi	1 Pkt		1 x	483.710.000	483.710.000
	Pengelola Kegiatan	1 Pkt		1 x	232.218.000	232.218.000

Pagaralam, 09 Oktober 2020

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam



5. RAB DITANDA TANGANI OLEH PU

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG**

**USULAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA**

KEGIATAN :
**PEMBANGUNAN / PENGADAAN / PENINGKATAN SARANA PRASARANA
LEMBAGA PEMASYARAKAN KLAS IIA BANCEUY BANDUNG**

PEKERJAAN :
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN PADA LAPAS KELAS IIA BANCEUY
LOKASI :
jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung

SUMBER DANA :
APBN TAHUN ANGGARAN 2021

USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY - BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
5252.998	GEDUNG / BANGUNAN			Rp 13,857,377,000.00	
011	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN PADA LAPAS KELAS IIA BANCEUY			Rp 13,857,377,000.00	
A.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN (533111)			Rp 12,374,278,000.00	
1.	Pembangunan Lanjutan Blok Hunian	792.00 m ²	Rp 11,709,000.00	Rp 9,273,528,000.00	Kapasitas 141 Orang
2	Pemasangan Pagar Transparant dalam antar gedung 4+1	69.00 m1	Rp 17,000,000.00	Rp 1,173,000,000.00	
3	Pembangunan Dapur	250.00 m ²	Rp 7,711,000.00	Rp 1,927,750,000.00	
B.	BELANJA MODAL PERRENCANAAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN (533115)			Rp 1,483,099,000.00	
1	Konsultan Perencana	1.00 Pkt	Rp 651,979,000.00	Rp 651,979,000.00	
2	Konsultan Manajemen Kontruksi	1.00 Pkt	Rp 481,120,000.00	Rp 481,120,000.00	
3	Pengelolaan Kegiatan	1.00 Pkt	Rp 350,000,000.00	Rp 350,000,000.00	

Bandung, 09 Oktober 2020

Disusun Oleh,

PENGELOLA TEKNIS
 DINAS PENGETAHUAN DAN PERMUKIMAN
 PROVINSI JAWA BARAT



Mengetahui,

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIA BANCEUY BANDUNG

KEPALA



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY

WADYANTO SAMBUDI

NIP. 19650707 198811 1 001

Wawan S.T.

NIP. 19640410 199002 1 002

USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN LANJUTAN BLOK HUNIAN LAPAS KELAS IIA BANCEUY BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pekerjaan	:	Pembangunan Lanjutan Blok Hunian Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung		
Lokasi	:	Jl. Soekarno Hatta No. 187A Bandung		
A. LINGKUP PEKERJAAN				
1. Pekerjaan	:	Pembangunan Lanjutan Blok Hunian Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung		
2. Lingkup Pekerjaan	:			
3. Alokasi Biaya Pembangunan	:			
4. Dasar Penentuan Harga Satuan	:			
Perhitungan Harga Satuan Bangunan, Imbalan Jasa Konsultan (Perencana dan Manajemen Konstruksi) dan Pengelola Proyek berpedoman pada PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA dan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
- Harga Satuan Bangunan Tidak Sederhana, Bertingkat /m ² bangunan pemerintah Kota Bandung adalah		Rp	7,435,350.00	
- HARGA UNTUK USULAN DI DIPA 2021		Rp	11,709,000.00	
B. RINCIAN PERHITUNGAN HARGA BANGUNAN DAN SARANA PENUNJANG				
1. PEMBANGUNAN LANJUTAN BLOK HUNIAN	:	792.00 m ²		
a. Luas Bangunan				
a.1 Lantai 1	:	396.00 m ²		
a.2 Lantai 2	:	396.00 m ²		
Total Luas Bangunan	:	792.00 m ²		
b. Faktor Pengali Bangunan 1 Lantai				
Lantai 1	:	1.000		
Lantai 2	:	1.090		
c. Anggaran Biaya				
Rincian Anggaran Biaya Pembangunan yang diperlukan :				
c.1 Komponen Biaya Pekerjaan Bangunan (Standar) :				
Biaya Pekerjaan Standar Lt. 1	:	396.00 x 1.000 x Rp.	7,435,350.00 = Rp.	2,944,398,600.00
Biaya Pekerjaan Standar Lt. 2	:	396.00 x 1.090 x Rp.	7,435,350.00 = Rp.	3,209,394,474.00
				6,153,793,074.00
Komponen Biaya Standar				
<i>Distribusi Komponen Biaya Bangunan Standar</i>				
1 Pondasi	:	10% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	615,379,307.40
2 Struktur	:	35% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	2,153,827,575.90
3 Lantai	:	8% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	492,303,445.92
4 Dinding	:	8% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	492,303,445.92
5 Plafond	:	7% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	430,765,515.18
6 Atap	:	10% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	615,379,307.40
7 Jaringan Utilitas	:	7% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	430,765,515.18
8 Finishing	:	15% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	923,068,961.10
Total Biaya Bangunan Standar		100%	= Rp.	6,153,793,074.00
c.2 Komponen Biaya Pekerjaan Sarana Pelengkap Dalam Bangunan dan Luar Bangunan (Non Standar) :				
Biaya Pekerjaan Non Standar	:	37% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	2,276,903,437.38
Komponen Biaya Non Standar				
<i>Distribusi Komponen Biaya Bangunan Non Standar</i>				
1 Jendela/Pintu Teralis Besi	:	5% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	307,689,653.70
2 Elektrikal	:	15% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	923,068,961.10
3 Pondasi Dalam	:	5% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	307,689,653.70
4 Mekanikal	:	12% x Rp.	6,153,793,074.00 = Rp.	738,455,168.88
Total Biaya Bangunan Non Standar		37%	= Rp.	2,276,903,437.38
Jumlah Biaya Bangunan (Standar dan Non Standar)			= Rp.	8,430,696,511.38
DIBULATKAN			= Rp.	8,430,696,000.00

USULAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN DAPUR LAPAS KELAS IIA BANCEUY BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pekerjaan : Pembangunan Dapur Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung
Lokasi : Jl. Soekarno Hatta No. 187A Bandung

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan : Pembangunan dapur Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung

2. Lingkup Pekerjaan :

1. Pembangunan Dapur	1	Unit	Rp	1,752,507,000.00
Jumlah Pekerjaan Standar dan Non Standar		: Rp	1,752,507,000.00	
PPN 10 %		: Rp	175,250,700.00	
Jumlah Total		: Rp	1,927,757,700.00	
Dibulatkan		: Rp	1,927,757,000.00	

3. Alokasi Biaya Pembangunan :

1. Biaya Bangunan Standar dan Non Standar	= Rp	1,927,757,000.00
2. Imbalan Jasa Konsultan Perencana (Interpolasi)	= Rp	103,072,000.00
3. Imbalan Jasa Konsultan MK (Interpolasi)	= Rp	85,696,000.00
4. Jasa Pengelola Proyek (Interpolasi)	= Rp	105,440,000.00
Jumlah Total Alokasi Biaya Pembangunan	= Rp	2,221,965,000.00
Dibulatkan	= Rp	2,221,965,000.00

4. Dasar Penentuan Harga Satuan

Perhitungan Harga Satuan Bangunan, Imbalan Jasa Konsultan (Perencana dan Manajemen Konstruksi) dan Pengelola Proyek berpedoman pada PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA dan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

- Harga Satuan Bangunan Tidak Sederhana, Tidak Bertingkat/m ² bangunan pemerintah Kota Bandung adalah	Rp	5,310,630.00
- HARGA UNTUK USULAN DI DIPA 2021	Rp	7,711,000.00

B. RINCIAN PERHITUNGAN HARGA BANGUNAN DAN SARANA PENUNJANG

1. PEMBANGUNAN DAPUR : 250.00 m²

a. Luas Bangunan	:	
a.1 Lantai 1	:	250.00 m ²
a.2 Lantai 2	:	- m ²
Total Luas Bangunan	:	250.00 m²

b. Faktor Pengali Bangunan 1 Lantai	:	
Lantai 1	:	1.000
Lantai 2	:	1.090

c. Anggaran Biaya

Rincian Anggaran Biaya Pembangunan yang diperlukan :

c.1 Komponen Biaya Pekerjaan Bangunan (Standar) :					
Biaya Pekerjaan Standar Lt. 1	:	250.00 x 1.000 x Rp.	5,310,630.00 = Rp.	1,327,657,500.00	
Biaya Pekerjaan Standar Lt. 2	:	- x 1.090 x Rp.	5,310,630.00 = Rp.	-	1,327,657,500.00
Total Biaya Bangunan Standar					1,327,657,500.00

Komponen Biaya Standar

Distribusi Komponen Biaya Bangunan Standar						
1 Pondasi	:	10% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	132,765,750.00	
2 Struktur	:	35% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	464,680,125.00	
3 Lantai	:	8% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	106,212,600.00	
4 Dinding	:	8% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	106,212,600.00	
5 Plafond	:	7% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	92,936,025.00	
6 Atap	:	10% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	132,765,750.00	
7 Jaringan Utilitas	:	7% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	92,936,025.00	
8 Finishing	:	15% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	199,148,625.00	
Total Biaya Bangunan Standar		100%				1,327,657,500.00

c.2 Komponen Biaya Pekerjaan Sarana Pelengkap Dalam Bangunan dan Luar Bangunan (Non Standar) :

Biaya Pekerjaan Non Standar	:	32% x Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	424,850,400.00
-----------------------------	---	-----------	------------------------	----------------

Komponen Biaya Non Standar

Distribusi Komponen Biaya Bangunan Non Standar						
1 Jendela/Pintu Teralis Besi	:	5% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	66,382,875.00	
2 Sound	:	15% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	199,148,625.00	
4 Mekanikal	:	12% x	Rp.	1,327,657,500.00 = Rp.	159,318,900.00	
Total Biaya Bangunan Non Standar		32%				424,850,400.00

Jumlah Biaya Bangunan (Standar dan Non Standar) = Rp. 1,752,507,900.00

DIBULATKAN = Rp. 1,752,507,000.00

REKAPITULASI PERINCIAN BIAYA

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Pekerjaan : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy - Bandung
Lokasi : Pemasangan Pagar Transparant dalam antar gedung 4+1
Tahun Anggaran : Jl. Soekarno Hatta No. 187A Bandung
Tahun Anggaran : 2021

No	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	2	3
I.	PEMASANGAN PAGAR TRANSPARAN ANTAR GEDUNG 4 + 1	
	Total - I	Rp 15,454,720.17
	Jumlah	Rp 15,454,720.17
	PPn 10%	Rp 1,545,472.02
	Total Jumlah	Rp 17,000,192.19
	Dibulatkan	Rp 17,000,000.00

REKAPITULASI PERINCIAN BIAYA

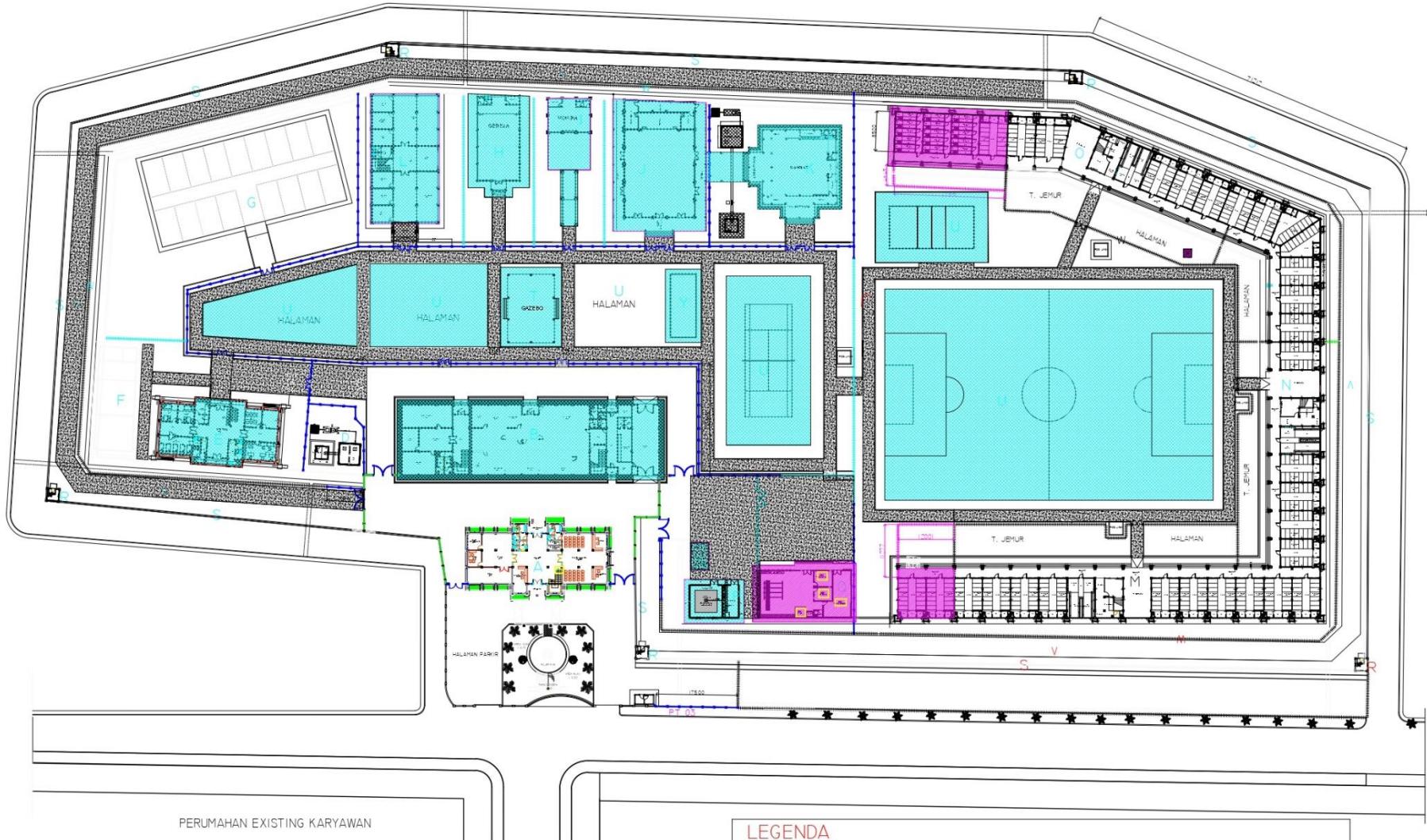
Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy - Bandung
Pekerjaan : Pemasangan Pagar Transparant dalam antar gedung 4+1
Lokasi : Jl. Soekarno Hatta No. 187A Bandung
Tahun Anggaran : 2021

No	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	2	3
I.	PEMASANGAN PAGAR TRANSPARAN ANTAR GEDUNG 4 + 1	
A	Pekerjaan Persiapan	
	Jumlah	87,910.00
B	Pekerjaan Galian, Urugan dan Lantai Kerja	
	Jumlah	72,331.84
C	Pekerjaan Pondasi	
	Jumlah	388,207.40
D	Pekerjaan Struktur Beton	
	Jumlah	1,099,693.00
E	Pekerjaan Pagar Transparan	
	Jumlah	13,057,378.93
F	Pekerjaan Kawat Duri (Razor Wire)	
	Jumlah	656,688.40
G	Pekerjaan Finishing	
	Jumlah	92,510.60
	Total - I	15,454,720.17
	Jumlah	15,454,720.17
	PPn 10%	1,545,472.02
	Total Jumlah	17,000,192.19
	Dibulatkan	17,000,000.00

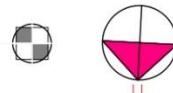
RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Pekerjaan : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy - Bandung
Lokasi : Pemasangan Pagar Transparant dalam antar gedung 4+1
Tahun Anggaran : Jl. Soekarno Hatta No. 187A Bandung
Tahun Anggaran : 2021

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 x 4
I.	PEMASANGAN PAGAR TRANSPARANT ANTAR GEDUNG 4 + 1			
A	Pekerjaan Persiapan			
1	Pek. Pembersihan & Pemberesan lapangan	1.00 m^2	19,700.00	19,700.00
2	Pek. Pengukuran & Pasang Bouwplank	1.00 m^2	68,210.00	68,210.00
	Jumlah			87,910.00
B	Pekerjaan Galian, Urugan dan Lantai Kerja			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak 0,7 x 0,7 x 1,0 m	0.49 m^3	84,750.00	41,527.50
2	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian Pondasi	0.12 m^3	28,250.00	3,460.63
3	Pek. Urugan Pasir bawah Pondasi Telapak, T = 5 cm	0.02 m^3	231,180.00	5,663.91
4	Pek. Lantai Kerja Bawah Pon. Telapak, t = 5 cm, ad. 1pc : 3ps : 5kr	0.02 m^3	884,890.00	21,679.81
	Jumlah			72,331.84
C	Pekerjaan Pondasi			
1	Pek. Pondasi Telapak 0,7 x 0,7 x 0,2 m, Mutu K-250	0.10 m^3	3,961,300.00	388,207.40
	Jumlah			388,207.40
D	Pekerjaan Struktur Beton			
1	Pek. Kolom Beton Type (K-2) 30/30 cm, Mutu K-250	0.09 m^3	5,766,100.00	518,949.00
2	Pek. Sloof Type (S-5) 20/40 cm, Mutu K-250	0.08 m^3	5,551,100.00	444,088.00
3	Pek. Plesteran Sloof dan Kolom, ad. 1Pc : 5 Ps	1.20 m^2	71,440.00	85,728.00
4	Pek. Acian Dinding	1.20 m^2	42,440.00	50,928.00
	Jumlah			1,099,693.00
E	Pekerjaan Pagar Transparan			
1	Pek. Tiang Pagar, Hollow Heavy Galvanised 100 x 100 mm	9.50 m^1	371,590.00	3,530,105.00
2	Pek. Rail Top, Hollow Heavy Galvanised 100 x 100 mm	1.00 m^1	371,590.00	371,590.00
3	Pek. Frame Besi Siku Galvanised, Uk. 50 x 50 x 5 mm (3,75 kg/m)	54.00 kg	33,090.00	1,786,860.00
4	Pek. Besi Bulat Galvanised, Dia. 10 mm (0,62 kg/m)	7.69 kg	32,740.00	251,705.12
5	Pas. Kawat Anti Panjat (Wire Mesh) Heavy Galvanised, Dia. 4 mm, Uk. 12,5 x 75 mm	4.20 m^2	1,641,300.00	6,893,460.00
6	Pas. Dop Pipa Galvanised, Uk. 100 x 100 mm, T = 3,2 mm	1.00 bh	45,300.00	45,300.00
7	Pas. Kupungan, Plat Besi Galvanised, T = 5 mm, Uk. 300 x 100 mm	1.22 kg	39,770.00	48,475.65
8	Pas. Mur dan Baut dia. 10 mm, P = 130 mm	12.00 bh	7,600.00	91,200.00
9	Pas. Mur dan Baut dia. 10 mm, P = 40 mm	4.00 bh	5,300.00	21,200.00
10	Pek. Besi Angkur dia. 12 mm, P = 200 mm	0.53 kg	32,740.00	17,483.16
	Jumlah			13,057,378.93
F	Pekerjaan Kawat Duri (Razor Wire)			
1	Pas. Kawat Silet (Razor Wire) dia. 450 mm	2.00 m^1	317,540.00	635,080.00
2	Pas. Penegang Kawat Silet, Besi Bulat Galvanish dia. 4 mm	0.66 kg	32,740.00	21,608.40
	Jumlah			656,688.40
G	Pekerjaan Finishing			
1	Pek. Pengecatan Tembok	1.82 m^2	50,830.00	92,510.60
	Jumlah			92,510.60
	Total - I		HARGA PER M1	15,454,720.17



MASTER PLAN



LEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| A | KANTOR UTAMA | J | GEDUNG SERBA GUNA | S | PAGAR TEMBOK KELILING |
| B | GEDUNG PORTIR | K | MESJID | T | GAZEBO |
| C | GEDUNG REGISTRASI | L | BALAI LATIHAN KERJA | U | HALAMAN TERBUKA (SARANA |
| D | MENARA AIR + DEEP WELL | M | BLOK HUNIAN B | | OLAH RAGA DAN LAHAN BLK) |
| E | POLIKLINIK | N | BLOK HUNIAN C | V | JALAN BRANGGANG |
| F | BLOK KARANTINA (EXISTING) | O | BLOK HUNIAN D | W | PAGAR TRANSPARAN ANTI PANJAT |
| G | BLOK HUNIAN A (EXISTING) | P | RUMAH GENSET DAN PANEL | X | TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH |
| H | GEREJA | Q | DAPUR | Y | GEDUNG KARUPAM |
| I | VIHARA | R | MENARA JAGA | | |

USULAN PEKERJAAN TAHUN 2021

GEDUNG DAN SARANA PRASARANA YANG BELUM DI KERJAKAN

6. ANALISA PU



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Letjen S. Parman No. 03 Telepon (0536) 3221150 Fax. (0536) 3224758 Palangka Raya

Nomor : 640/99/DPUPR-CK/XI/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penilaian Keandalan dan Rekomendasi Penanganan Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya

Palangka Raya, 7 November 2019

Kepada Yth.

**Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
Palangka Raya Kantor Wilayah
Kalimantan Tengah**

di –

Palangka Raya

Sehubungan dengan surat Nomor W.17.PAS.PAS.14-UM.01.01-461 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permintaan Penilaian Keandalan dan Rekomendasi Penanganan Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya , maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, No. 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bahwa:
 - a. Konsultasi terkait rekomendasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung Negara yang pembangunannya di tingkat provinsi dapat dilakukan oleh Menteri maupun Gubernur melalui Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung.
 - b. setiap pembangunan bangunan gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau OPD harus mendapatkan bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis melalui tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.
2. Berdasarkan maksud surat permintaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, maka kami simpulkan bahwa akan dilakukan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung yakni renovasi (memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya).
3. Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Negara dilaksanakan dengan mempertimbangkan: Umur bangunan (50 tahun), penyusutan (2% per tahun untuk bangunan permanen), dan kerusakan bangunan (ringan, sedang, berat).
4. Berdasarkan perhitungan keperluan luasan 1 orang $\pm 10 \text{ m}^2$, untuk kebutuhan ruang pegawai saat ini masih cukup dengan luasan gedung 404,86 M², tetapi untuk penambahan pegawai lagi, luasan ruangan sudah tidak layak.

5. Untuk mengetahui keandalan bangunan perlu dilakukan tes/uji laboratorium terhadap bangunan tersebut, karena analisis terkait kerusakan bangunan yang kami lakukan hanya sebatas visualisasi.
6. Rekomendasi Teknis Kebutuhan Biaya pembangunan bangunan gedung Negara Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya akan segera kami proses.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,



ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA RENOVASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NAMA BANGUNAN : GEDUNG BANGUNAN KANTOR BALAI PERMASYARAKATAN KELAS I PALANGKA RAYA
 TAHUN DIBANGUN :
 JUMLAH TINGKAT : 2 Lantai LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 LUAS LANTAI BANGUNAN AWAL : 585 m² PEMAKAI : BALAI PERMASYARAKATAN KELAS I PALANGKA RAYA
 LUAS LANTAI BANGUNAN BARU : 400 m² ALAMAT : JL. TJILIK RIWUT KM. 4 PALANGKA RAYA
 KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN : 1,09 ALAMAT KIB : JL. TJILIK RIWUT KM. 4 PALANGKA RAYA
 FUNGSI BANGUNAN/ RUANG : RUANG KANTOR
 KLASIFIKASI BANGUNAN : SEDERHANA

I. DASAR ANALISIS

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) TA 2019 = Rp 4 390 000
Berdasarkan pedoman satuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan oleh Walikota Palangka Raya

II. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN BARU

- | | |
|--|--|
| A. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar | = Koefisien Tingkat Bangunan x HSBGN |
| Biaya Satuan Pekerjaan Standar | = 1.090 x Rp 4.390.000 = Rp 4.785.100 |
| B. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Standar | = Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar |
| Biaya Pekerjaan Standar | = 400,00 x Rp 4.785,100 |
| | = Rp 1.914.040.000 |

III. KEBUTUHAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR BANGUNAN BARU

A. Analisis Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN		DISULKAN	BOBOT TERBANGUN	NILAI (%)
		min.	max.			
1.	Alat Pengkondisi Udara	7,75%	15,00%	10,00%	75,00	7,50
2.	Elevator/Escalator	8,75%	14,00%	9,00%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)	2,75%	4,00%	4,00%	50,00	2,00
4.	Telepon/PABX	1,75%	3,00%	3,00%	50,00	1,50
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6,75%	11,00%	10,00%	-	-
6.	Elektrikal	7,75%	12,00%	12,00%	25,00	3,00
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7,75%	12,00%	12,00%	75,00	9,00
8.	Penangkal Petir Khusus	1,75%	2,00%	2,00%	50,00	1,00
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1,75%	2,00%	2,00%	-	-
10.	Interior (Termasuk furniture)	15,75%	25,00%	25,00%	-	-
11.	Gas Pembakaran	1,75%	2,00%	2,00%	-	-
12.	Gas Medis	2,75%	4,00%	4,00%	-	-
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	1,75%	3,00%	3,00%	-	-
14.	Pondasi Dalam	7,75%	12,00%	12,00%	75,00	9,00
15.	Fasilitas Penyandang Cacat	3,75%	5,00%	5,00%	100,00	5,00
16.	Sarana/Prasarana Lingkungan	3,75%	8,00%	8,00%	100,00	8,00
17.	Perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,00%	1,00%	1,00%	100,00	1,00
18.	Penyiapan dan Pematangan Lahan	3,50%	3,50%	3,50%	100,00	3,50
19.	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau (Green Building)	9,50%	9,50%	9,50%	-	-
20.	Penyambungan Utilitas	2,00%	2,00%	2,00%	50,00	1,00
		150,00%				51,50

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar	$51,50 \% \times 400,000 \text{ x Rp } 4.390.000 = \text{Rp}$	2 464 327
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar	$400,00 \text{ x Rp } 2.464.327 = \text{Rp}$	985 730 800

IV. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN STANDAR BANGUNAN LAMA

A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN		TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	PONDASI	PONDASI	10,00%	10,00%	-	-
2.	STRUKTUR	KOLOM, BALOK & RING BALK & PLAT LANTAI	25,00%	25,00%	-	-
		PLESTERAN	5,00%	10,00%	-	-
3.	ATAP	RANGKA ATAP	7,00%	7,00%	25,00	1,75
		PENUTUP ATAP	3,00%	3,00%	50,00	1,50
4.	LANGIT-LANGIT	RANGKA LANGIT-LANGIT	5,00%	5,00%	50,00	2,50
		PENUTUP LANGIT-LANGIT	3,00%	3,00%	60,00	1,80
5.	DINDING	BATU BATA/ PARTISI	4,00%	4,00%	25,00	1,00
		PLESTERAN	2,00%	2,00%	30,00	0,60
		KACA	1,50%	1,50%	30,00	0,45
		PINTU	1,50%	1,50%	30,00	0,45
		KOSEN	1,00%	1,00%	20,00	0,20
6.	LANTAI	PENUTUP LANTAI	9,00%	10,00%	15,00	1,35
7.	UTILITAS	INSTALASI LISTRIK	5,00%	5,00%	60,00	3,00
		INSTALASI AIR	1,50%	1,50%	10,00	0,15
		DRAINASE LIMBAH	1,50%	1,50%	-	-
8.	FINISHING	FINISHING STRUKTUR (CAT)	4,00%	4,00%	100,00	4,00
		FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)	4,00%	4,00%	100,00	4,00
		FINISHING DINDING (CAT)	5,00%	5,00%	100,00	5,00
		FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT)	2,00%	2,00%	100,00	2,00
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%)					100,00%	28,75

Jenis Perawatan = PERAWATAN RINGAN

- B. Analisis Kebutuhan Biaya Satuan Pekerjaan Standar = PERAWATAN RINGAN
= Prosentase Tingkat Kerusakan x Koef. Lantai x HSBGN

RINGAN	< 30%
SEDANG	> 30% - 45%
BERAT	> 45% - 65%
KHUSUS	> 65 %

Biaya Komponen Pekerjaan Standar
Biaya Pembongkaran

$$= 29,75\% \times 1.090 \times 0,00 \times \text{Rp } 4.390.000 = \text{Rp } 1.423.567$$

$$= 10,00\% \quad \times \text{Rp. } 1.423.567 = \text{Rp } 142.357$$

- Skala Sukan / Eksperian Standard

= Luas Lantai x Biaya Satuan Pekerjaan Standar

V. KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN KOMPONEN PEKERJAAN NON STANDAR BANGUNAN LAMA

A. Analisis Kerusakan Komponen Pekerjaan Non Standar

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TERHADAP SELURUH BANGUNAN	BOBOT MAKSIMUM	BOBOT (%)	NILAI (%)
1.	Alat Pengkondisi Udara	7,75%	15,00%	-	-
2.	Elevator/Escalator	8,75%	14,00%	-	-
3.	Tata Suara (Sound System)	2,75%	4,00%	20,00	0,55
4.	Telpon/PABX	1,75%	3,00%	20,00	0,35
5.	Instalasi IT (Informasi & Teknologi)	6,75%	11,00%	-	-
6.	Elektrikal	7,75%	12,00%	25,00	1,94
7.	Sistem Protoksi Kebakaran	7,75%	12,00%	75,00	5,81
8.	Penangkal Petir Khusus	1,75%	2,00%	50,00	0,86
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	1,75%	2,00%	-	-
10.	Interior (Termasuk furniture)	15,75%	25,00%	-	-
11.	Gas Pembakaran	1,75%	2,00%	-	-
12.	Gas Medis	2,75%	4,00%	-	-
13.	Pencegahan Bahaya Rayap	1,75%	3,00%	-	-
14.	Pondasi Dalam	7,75%	12,00%	-	-
15.	Fasilitas Penyandang Cacat	3,75%	5,00%	100,00	5,00
16.	Sarana/Persarana Lingkungan	3,75%	8,00%	-	-
17.	Perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,00%	1,00%	-	-
18.	Penyiapan dan Pematangan Lahan	3,50%	3,50%	-	-
19.	Pemenuhan Persyaratan Bangunan Gedung Hijau (Green Building)	9,50%	9,50%	-	-
20.	Penyambungan Utilitas	2,00%	2,00%	-	-
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN NON STANDAR (%)		100,00%			14,53

Biaya Satuan Pekerjaan Non Standar
Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar

$$14,53\% \times 1,090 \times 0,00 \times \text{Rp } 4,390.000 = \text{Rp } 695.275$$

$$585 \times \text{Rp } 695.275 = \text{Rp } 406.735.875$$

B. Analisis Biaya Pekerjaan Basement

NO	PEKERJAAN	KOEFESIEN BASEMENT (%)	LUAS (m ²)	HSBGN (Rp.)	BIAYA (Rp.)	BOBOT KERUSAKA N (%)	BIAYA PERBAIKAN (Rp.)
	Basement (per m ²)	120	400	4.390.000	0	0	0

C. Analisis Biaya Peningkatan Mutu

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	NILAI KERUSAKAN (%)	PROSENTASE PENINGKATAN MUTU			BOBOT YANG DITINGKATKAN (%)	BIAYA PERBAIKAN (Rp.)
			min.	max.	DIUSULKAN		
1	Lantai	-	15%	30%	100%	0,00	0
2	Dinding	-	15%	30%	100%	0,00	0
						0	

D. Kebutuhan Biaya Pekerjaan Non Standar

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Komponen Pekerjaan Non Standar | = Rp 1 392 466 675 |
| 2. Biaya Pekerjaan Basement | = Rp 0 |
| 3. Biaya Peningkatan Mutu | = Rp 0 + |
| | Rp 1 392 466 675 |

VI. BIAYA PEKERJAAN FISIK

- | | |
|--|--------------------|
| 1. BIAYA PEKERJAAN STANDAR (LUAS BANGUNAN BARU) | = Rp 1 914 040 000 |
| 2. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR (LUAS BANGUNAN BARU) | = Rp 985 730 800 |
| 3. BIAYA PEKERJAAN STANDAR (LUAS BANGUNAN LAMA - RENOVASI) | = Rp 916 065 540 |
| 4. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR (LUAS BANGUNAN LAMA - RENOVASI) | = Rp 406 735 875 + |
| | = Rp 4 222 572 215 |

Dibulatkan = Rp 4 223 000 000

V. BIAYA PEKERJAAN RENOVASI

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. BIAYA KONSTRUKSI FISIK | = Rp 4 223 000 000 |
| 2. BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI | = Rp 175 000 000 |
| 3. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI | = Rp 122 000 000 |
| 4. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN | = Rp 138 000 000 + |

TOTAL BIAYA PERAWATAN = Rp 4 658 000 000

TERBILANG : EMPAT MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH

MENGETAHUI :



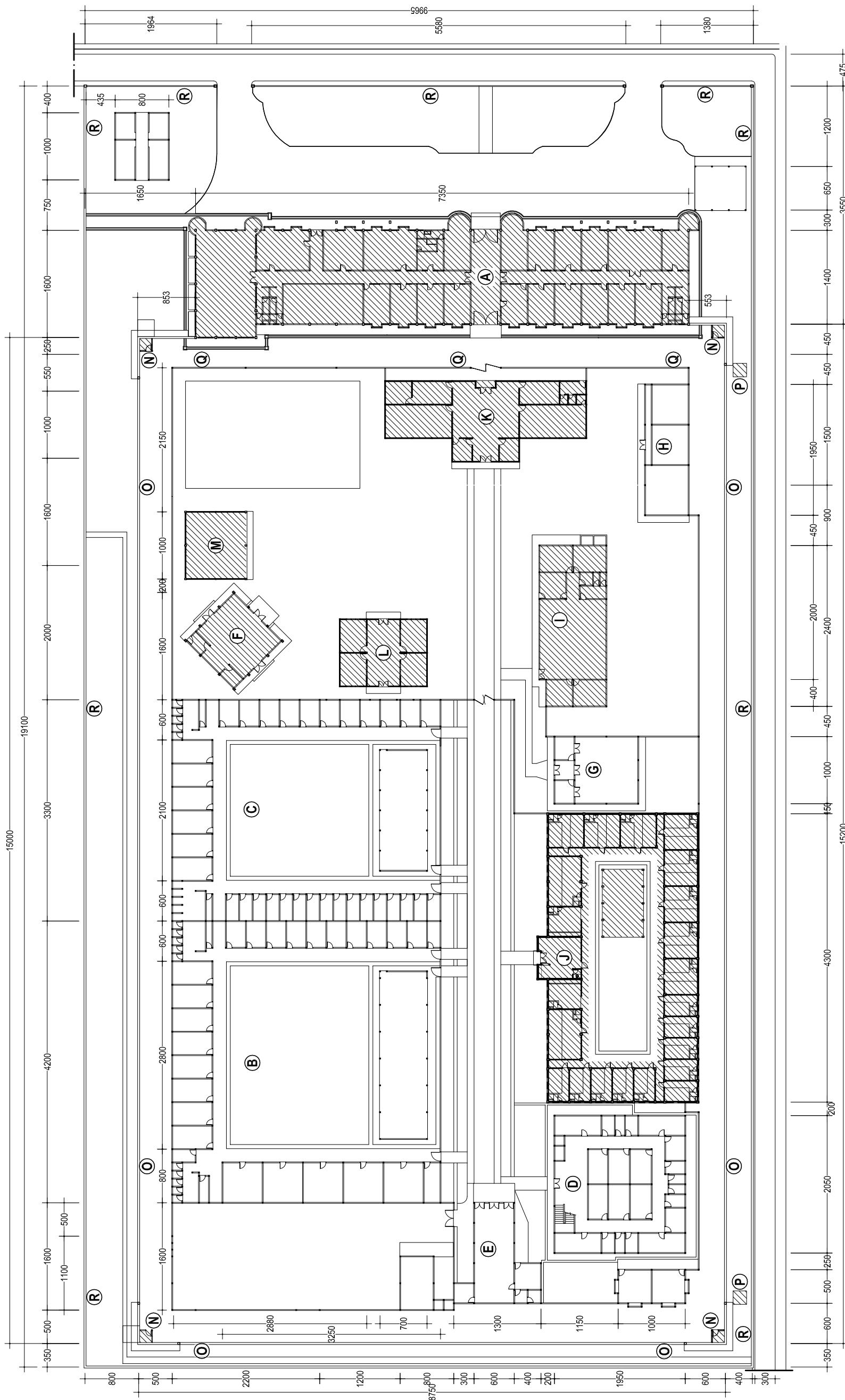
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
A/N. TIM PELAKSANA KOORDINASI PENGELOLAAN TEKNIS

EDDY KARUSMAN, ST., MT.
NIP. 19770207 200312 1 004

Catatan :

Biaya tersebut tidak mengikat pelaksanaan fisik dan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi lapangan pada waktu pelaksanaan.

7. SITE PLAN



LAY OUT LP MANADO (RENCANA) SKALA 1 : 600

Q. PAGAR PEMBATAS DALAM (RENCANA)
R. PAGAR PEMBATAS SISI LUAR (RENCANA)

SINALA - 1.000

- D. BLOK TAHANAN I
 - E. GEREJA
 - F. MUSHOLA (RENOVASI)
 - G. RUANG KELAS
 - H. GUDANG
 - L. POLIKLINIK (RENCANA)
 - M. BENGKEL KERJA (RENCANA)
 - N. POS ATAS (YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI)
 - O. PAGAR TEMBOK KELLING LUAR (YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI)
 - P. SUMUR BOR (RENCANA)

KETERANGAN

- A. KANTOR UTAMA (**RENOVASI**)
B. BLOK TAHANAN A
C. BLOK TAHANAN B
D. BLOK TAHANAN I
E. GEREJA
F. MUSHOLA (**RENOVASI**)
G. RUANG KELAS
H. GUDANG

8. HSBGN

Pedoman Harga Satuan Per Meter Persegi Tertinggi Bangunan Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas

Tabel 3. 11
Pedoman Harga Satuan Per Meter Persegi Tertinggi Bangunan
Gedung Pemerintah dan Rumah Dinas

NO	DAERAH	HARGA GEDUNG		HARGA RUMAH DINAS		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	TIPE C	TIPE B	TIPE A
1	KOTA BEKASI	5,447,520.00	7,627,230.00	3,802,500.00	4,564,170.00	4,564,170.00
2	KAB. BEKASI	5,528,250.00	7,739,550.00	4,100,850.00	4,922,190.00	4,922,190.00
3	KOTA BOGOR	5,345,730.00	7,484,490.00	3,810,690.00	4,573,530.00	4,573,530.00
4	KAB. BOGOR	5,681,520.00	7,953,660.00	4,009,590.00	4,873,050.00	4,873,050.00
5	KAB. DEPOK	5,318,820.00	7,448,220.00	4,135,950.00	4,963,140.00	4,963,140.00
6	KOTA SUKABUMI	5,575,050.00	7,806,240.00	3,760,380.00	4,511,520.00	4,511,520.00
7	KAB. SUKABUMI	5,550,480.00	7,771,140.00	3,715,920.00	4,460,040.00	4,460,040.00
8	KAB. CIANJUR	5,482,620.00	7,675,200.00	3,952,260.00	4,743,180.00	4,743,180.00
9	KAB. KARAWANG	5,549,310.00	7,767,630.00	4,083,300.00	4,899,960.00	4,899,960.00
10	KAB. PURWAKARTA	5,081,310.00	7,679,880.00	3,861,000.00	4,578,210.00	4,578,210.00
11	KAB. SUBANG	5,499,000.00	7,698,600.00	3,921,840.00	4,705,740.00	4,705,740.00
12	KOTA BANDUNG	5,310,630.00	7,435,350.00	3,928,860.00	4,715,100.00	4,715,100.00
13	KAB. BANDUNG	5,376,150.00	7,526,610.00	3,751,020.00	4,500,990.00	4,500,990.00
14	KAB. BANDUNG BARAT	5,286,060.00	7,401,420.00	3,690,180.00	4,430,790.00	4,430,790.00
15	KOTA CIMahi	5,324,670.00	7,454,070.00	3,853,980.00	4,625,010.00	4,625,010.00
16	KAB. SUMEDANG	5,267,340.00	7,372,170.00	3,829,410.00	4,595,760.00	4,595,760.00
17	KAB. GARUT	5,171,400.00	7,239,960.00	3,861,000.00	4,623,840.00	4,623,840.00
18	KAB. TASIKMALAYA	5,259,150.00	7,365,150.00	3,724,110.00	4,464,720.00	4,464,720.00
19	KOTA TASIKMALAYA	5,232,240.00	7,325,370.00	3,871,530.00	4,647,240.00	4,647,240.00

NO	DAERAH	HARGA GEDUNG		HARGA RUMAH DINAS		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	TIPE C	TIPE B	TIPE A
20	KAB. CIAMIS	5,324,670.00	7,454,070.00	3,925,350.00	4,710,420.00	4,710,420.00
21	KAB. PANGANDARAN	5,324,670.00	7,454,070.00	3,925,350.00	4,710,420.00	4,710,420.00
22	KOTA BANJAR	5,482,620.00	7,675,200.00	3,853,980.00	4,625,010.00	4,625,010.00
23	KAB. KUNINGAN	5,254,470.00	7,356,960.00	3,708,900.00	4,448,340.00	4,448,340.00
24	KOTA CIREBON	5,149,170.00	7,493,850.00	3,889,080.00	4,610,970.00	4,610,970.00
25	KAB. CIREBON	5,523,570.00	7,732,530.00	4,058,730.00	4,850,820.00	4,850,820.00
26	KAB. MAJALENGKA	5,277,870.00	7,390,890.00	3,809,520.00	4,572,360.00	4,572,360.00
27	KAB. INDRAMAYU	5,550,480.00	7,771,140.00	4,051,710.00	4,862,520.00	4,862,520.00

Tabel 3. 12
Pedoman Harga Satuan Per Meter Tertinggi Bangunan Pagar

NO	DAERAH	GEDUNG SEDERHANA (Rp / M1)		GEDUNG TIDAK SEDERHANA (Rp/M1)		RUMAH NEGARA TIPE C (Rp/M1)		RUMAH NEGARA TIPE B (Rp/M1)		RUMAH NEGARA TIPE A (Rp/M1)	
		PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG
1	KOTA BEKASI	2,094,300.00	1,674,270.00	2,303,730.00	1,836,900.00	1,243,710.00	1,312,740.00	1,368,900.00	1,443,780.00	1,368,900.00	1,443,780.00
2	KAB. BEKASI	2,053,350.00	1,798,290.00	2,258,100.00	1,977,300.00	1,263,600.00	1,415,700.00	1,391,130.00	1,557,270.00	1,391,130.00	1,557,270.00
3	KOTA BOGOR	1,958,580.00	1,742,130.00	2,153,970.00	1,917,630.00	1,209,780.00	1,371,240.00	1,332,630.00	1,510,470.00	1,332,630.00	1,510,470.00
4	KAB. BOGOR	2,130,570.00	1,791,270.00	2,342,340.00	1,971,450.00	1,217,970.00	1,415,700.00	1,340,820.00	1,557,270.00	1,340,820.00	1,557,270.00
5	KAB. DEPOK	2,036,970.00	1,840,410.00	2,240,550.00	2,022,930.00	1,281,150.00	1,450,800.00	1,408,680.00	1,593,540.00	1,408,680.00	1,593,540.00
6	KOTA SUKABUMI	1,985,490.00	1,653,210.00	2,190,240.00	1,820,520.00	1,160,640.00	1,302,210.00	1,277,640.00	1,430,910.00	1,277,640.00	1,430,910.00
7	KAB. SUKABUMI	1,969,110.00	1,910,610.00	2,165,670.00	2,103,660.00	1,227,330.00	1,518,660.00	1,349,010.00	1,668,420.00	1,349,010.00	1,668,420.00
8	KAB. CIANJUR	1,930,500.00	1,738,620.00	2,121,210.00	1,911,780.00	1,199,250.00	1,368,900.00	1,319,760.00	1,505,790.00	1,319,760.00	1,505,790.00

NO	DAERAH	GEDUNG SEDERHANA (Rp / M ²)		GEDUNG TIDAK SEDERHANA (Rp/M ²)		RUMAH NEGARA TIPE C (Rp/M ²)		RUMAH NEGARA TIPE B (Rp/M ²)		RUMAH NEGARA TIPE A (Rp/M ²)	
		PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG	PAGAR DEPAN	PAGAR SAMPING / BELAKANG
9	KAB. KARAWANG	2,022,930.00	1,822,860.00	2,226,510.00	2,005,380.00	1,275,300.00	1,426,230.00	1,400,490.00	1,571,310.00	1,400,490.00	1,571,310.00
10	KAB. PURWAKARTA	1,923,480.00	1,696,500.00	2,115,360.00	1,868,490.00	1,198,080.00	1,332,630.00	1,317,420.00	1,467,180.00	1,317,420.00	1,467,180.00
11	KAB. SUBANG	1,918,800.00	1,698,840.00	2,111,850.00	1,869,660.00	1,193,400.00	1,352,520.00	1,313,910.00	1,469,520.00	1,313,910.00	1,469,520.00
12	KOTA BANDUNG	1,757,340.00	1,634,490.00	1,934,010.00	1,797,120.00	1,174,680.00	1,287,000.00	1,291,680.00	1,413,360.00	1,291,680.00	1,413,360.00
13	KAB. BANDUNG	1,868,490.00	1,639,170.00	2,053,350.00	1,805,310.00	1,158,300.00	1,287,000.00	1,274,130.00	1,413,360.00	1,274,130.00	1,413,360.00
14	KAB. BANDUNG BARAT	1,918,800.00	1,663,740.00	2,111,850.00	1,829,880.00	1,162,980.00	1,308,060.00	1,279,980.00	1,439,100.00	1,279,980.00	1,439,100.00
15	KOTA CIMAH	1,867,320.00	1,636,830.00	2,053,350.00	1,799,460.00	1,155,960.00	1,283,490.00	1,271,790.00	1,412,190.00	1,271,790.00	1,412,190.00
16	KAB. SUMEDANG	1,853,280.00	1,606,410.00	2,038,140.00	1,767,870.00	1,146,600.00	1,258,920.00	1,261,260.00	1,384,110.00	1,261,260.00	1,384,110.00
17	KAB. GARUT	1,769,040.00	1,529,190.00	1,946,880.00	1,682,460.00	1,082,250.00	1,194,570.00	1,209,780.00	1,313,910.00	1,209,780.00	1,313,910.00
18	KAB. TASIKMALAYA	1,776,060.00	1,546,740.00	1,952,730.00	1,702,350.00	1,189,890.00	1,207,440.00	1,295,190.00	1,331,460.00	1,295,190.00	1,331,460.00
19	KOTA TASIKMALAYA	1,794,780.00	1,560,780.00	1,973,790.00	1,718,730.00	1,189,890.00	1,223,820.00	1,295,190.00	1,345,500.00	1,295,190.00	1,345,500.00
20	KAB. CIAMIS	1,848,600.00	1,615,770.00	2,033,460.00	1,779,570.00	1,143,090.00	1,275,300.00	1,257,750.00	1,402,830.00	1,257,750.00	1,402,830.00
21	KAB. PANGANDARAN	1,848,600.00	1,615,770.00	2,033,460.00	1,779,570.00	1,143,090.00	1,275,300.00	1,257,750.00	1,402,830.00	1,257,750.00	1,402,830.00
22	KOTA BANJAR	1,795,950.00	1,587,690.00	1,974,960.00	1,746,810.00	1,102,140.00	1,250,730.00	1,213,290.00	1,377,090.00	1,213,290.00	1,377,090.00
23	KAB. KUNINGAN	1,784,250.00	1,544,400.00	1,962,090.00	1,696,500.00	1,089,270.00	1,203,930.00	1,199,250.00	1,354,860.00	1,199,250.00	1,354,860.00
24	KOTA CIREBON	1,860,300.00	1,600,560.00	2,048,670.00	1,759,680.00	1,138,410.00	1,250,730.00	1,251,900.00	1,377,090.00	1,251,900.00	1,377,090.00
25	KAB. CIREBON	1,872,000.00	1,634,490.00	2,059,200.00	1,795,950.00	1,159,470.00	1,279,980.00	1,276,470.00	1,408,680.00	1,276,470.00	1,408,680.00
26	KAB. MAJALENGKA	1,828,710.00	1,545,570.00	1,974,960.00	1,701,180.00	1,159,470.00	1,207,440.00	1,209,780.00	1,331,460.00	1,209,780.00	1,331,460.00
27	KAB. INDRAMAYU	2,046,330.00	1,657,890.00	2,249,910.00	1,822,860.00	1,185,210.00	1,305,720.00	1,303,380.00	1,435,590.00	1,303,380.00	1,435,590.00

9. RKBMN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 (Kotak Pos 46) Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 5253004 (Ext. 341, 328). Faksimili : (021) 5253165
Laman : www.kemenkumham.go.id, Email : analisa.rokap@gmail.com

Nomor : SEK.4-PB.01.03-207 29 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penelaahan RKBMN Tahun 2021 dengan Aplikasi SIMAN
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Yth. Daftar Terlampir

di Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-861/Mk.6/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang isinya berupa hasil penelaahan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil penelaahan RKBMN dimaksud. Hasil Penelaahan RKBMN ini agar digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKAKL) untuk tahun anggaran 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lampiran surat
Nomor : SEK.4-PB.01.03-207
Tanggal : 29 Januari 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
11. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
36. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
37. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
38. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
39. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
41. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung;
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
43. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
44. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat;
45. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5-861 /MK.6 /2019

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
Tahun 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

13 DEC 2019

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
u.p. Sekretaris Jenderal
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.4-PB.01.02-1532 tanggal 15 Oktober 2019 hal Penyampaian Dokumen RKBMN Kemenkumham untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2021, pada prinsipnya kami menyetujui RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMN dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan RKBMN menyajikan informasi berupa satuan BMN yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.
2. Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN dapat mengakibatkan belanja modal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. Hasil Penelaahan RKBMN untuk pemeliharaan BMN dapat mengakibatkan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
4. Hasil Penelaahan RKBMN dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan.
5. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran.

Rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan atas BMN yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Isa Rachmatarwata

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KETERANGAN
					UNIT/BIDANG	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	52311	4010201013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Digunakan Sendiri	4	144-	
	52311	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Digunakan Sendiri	1	50-	
	52311	4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Digunakan Sendiri	3	18-	
	52311	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Digunakan Sendiri	2	196-	
	52311	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Digunakan Sendiri	1	60-	
	52311	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Digunakan Sendiri	1	50-	
	52311	4010121999	Bangunan Rumah Tahapan Lainnya	Digunakan Sendiri	8	1.928-	
	52311	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Digunakan Sendiri	3	18-	
	52311	4040104999	Pagar Lainnya	Digunakan Sendiri	2	521-	
	52311	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Digunakan Sendiri	1	58-	
	52311	4040104001	Pagar Permanen	Digunakan Sendiri	3	3.219-	
	52311	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Digunakan Sendiri	3	258-	
	52311	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Digunakan Sendiri	1	50-	
	52312	3010304002	Portable Generating Set	Digunakan Sendiri	1	0-	
	52312	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	1	0-	
	52312	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	2	0-	
	52313	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	Digunakan Sendiri	1	2.700-	
	52313	5010109001	Jalan Khusus Inspeksi	Digunakan Sendiri	1	1.750-	
8	013051800407041000KD - LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK / KAB. BANGGAI				40	7.618	
	52311	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Digunakan Sendiri	1	90-	
	52311	4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Digunakan Sendiri	1	20-	
	52311	4010201013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Digunakan Sendiri	1	36-	
	52311	4040104001	Pagar Permanen	Digunakan Sendiri	3	210-	
	52311	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Digunakan Sendiri	11	550-	
	52311	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Digunakan Sendiri	2	83-	
	52311	4010121002	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	Digunakan Sendiri	9	275-	
	52311	4010130999	Bangunan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	200-	
	52311	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	2	5.819-	

NO	JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	UNIT/BIDANG	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	52311	4010120002	Bangunan Gedung L. P. Kelas II	Digunakan Sendiri	2	60-	
	52311	4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Digunakan Sendiri	1	120-	
	52311	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Digunakan Sendiri	2	40-	
	52311	4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Digunakan Sendiri	1	20-	
	52311	4030104001	Bangunan Menara Pengawas Permanen	Digunakan Sendiri	1	95-	
	52312	3010304002	Portable Generating Set	Digunakan Sendiri	1	0-	
	52312	3020105020	Mobil Unit Tahanan	Digunakan Sendiri	1	0-	
9	013051800407060000KD - CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA KOLONODALE / KAB. MOROWALI			26	5.205		
	52311	4010121003	Gedung Tahanan Karantina	Digunakan Sendiri	1	150-	
	52311	4010130999	Bangunan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	200-	
	52311	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	204-	
	52311	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Digunakan Sendiri	1	130-	
	52311	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Digunakan Sendiri	2	90-	
	52311	4040104001	Pagar Permanen	Digunakan Sendiri	2	2.750-	
	52311	4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Digunakan Sendiri	2	314-	
	52311	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Digunakan Sendiri	1	200-	
	52311	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Digunakan Sendiri	4	200-	
	52311	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Digunakan Sendiri	1	125-	
	52311	4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Digunakan Sendiri	1	81-	
	52311	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Digunakan Sendiri	1	70-	
	52311	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Digunakan Sendiri	2	27-	
	52311	4010121999	Bangunan Rumah Tahanan Lainnya	Digunakan Sendiri	3	664-	
	52312	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	2	0-	
	52312	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	1	0-	
10	013051800407066000KD - RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB POSO / KAB. POSO			18	1.952		
	52311	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	2	766-	
	52311	4010121002	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	Digunakan Sendiri	1	660-	
	52311	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Digunakan Sendiri	1	4-	

NO	JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN	UNIT/BIDANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	013120300409157000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG				1		0
	52312 3020102003 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		Digunakan Sendiri		1		0
C	013121700 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULUT				1		500
1	013121700409159000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA / KOTA BITUNG				1		500
	52311 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen		Digunakan Sendiri		1		500

Jakarta,
 a.n. Menteri Keuangan
 Direktur Barang Milik Negara



10. FOTO/ DOKUMENTASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK
Jln. Pulau Kalimantan No : 267 Luwuk Laman: www.lapasluwuk.com,
Email : lapasluwuk@rocketmail.com

**FOTO DOKUMENTASI KONDISI PRASARANA RENCANA
PEMBANGUNAN DI LAPAS LUWUK**



Gambar 1

Kondisi Pos Jaga Atas untuk masing 4 titik yang saat ini
Posisi menggantung di tembok lapas





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK
Jln. Pulau Kalimantan No : 267 Luwuk Laman: www.lapasluwuk.com,
Email : lapasluwuk@rocketmail.com



Gambar 2
Kondisi Drainase + Plat Pelintas yang saat ini





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK
Jln. Pulau Kalimantan No : 267 Luwuk Laman: www.lapasluwuk.com,
Email : lapasluwuk@rocketmail.com



Gambar 3
Kondisi Jalan Inspeksi dalam dan pagar steril





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUWUK
Jln. Pulau Kalimantan No : 267 Luwuk Laman: www.lapasluwuk.com



Gambar 4
Kondisi Pos Jaga Bawah Intra dan Ekstra



11. SERTIFIKAT TANAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 5

PROVINSI	:	PAPUA BARAT
KABUPATEN / KOTA	:	SORONG SELATAN
KECAMATAN	:	WAYER
D E S A / KELURAHAN	:	SUNGGUER

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SORONG SELATAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 222 / 2014

DAFTAR ISIAN 208

No. 152 / 2014

3 3 • 0 5 • 1 1 • 0 4 • 3 • 0 0 0 0 5 4

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : Desa / Kel. : SUNGGUER Tgl. berakhirnya hak : —</p> <p>b) NIB 33.05.11.04.00205 Letak Tanah Jl. Teminabuan-Ayamaru</p> <p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / P. 3 Penggabungan bidang <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 18-06-2014 No. 195 / 2014 Luas. 10000 M2</p> <p>i) PENUNJUK</p> <p>Warkah Nomor : 152 / 208 / 2014 PETA PENDAFTARAN, Nomor Lembar : 53.1-03.176-05-9, KOTAK: A.B.C.4.5.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p align="center">PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p> <p>g) PEMBUKUAN</p> <p align="center">Teminabuan, 18-06-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sorong Selatan</p> <p align="center">  JIMMY HADY TEPPY, BA </p> <p align="center">NIP 19580624 198203 1 001</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p align="center">Teminabuan, 18-06-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sorong Selatan</p> <p align="center">  JIMMY HADY TEPPY, BA </p> <p align="center">NIP 19580624 198203 1 001</p>
--	--

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

12. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY BANDUNG
Jl. Soekarno Hatta No. 187 A Bandung
Telepon / Faksimile (022) 5202751, Email : lapasbanceuy@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

NOMOR : W.11.PAS.PAS.3-PR-02-04-1258

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Saptono Sambudji

NIP : 19650707 198811 1 001

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kegiatan dan Anggaran Pembangunan / Rehabilitasi / Renovasi Bangunan
UPT Pemasyarakatan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penyusun anggaran.
2. Sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan pada TA. 2021

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.



Bandung, 19 Oktober 2020
Kepala

Tri Saptono Sambudji
NIP. 19650707 198811 1 001